

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Stakeholder*

Kita pasti sering mendengar istilah kata *stakeholder*. Dalam berbagai kegiatan sering digunakan untuk menunjuk pada komunitas atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu, *stakeholder* adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuannya. *Stakeholder* sering kita temui dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis sehingga beberapa perusahaan atau pemerintahan tidak lepas dari keberadaan kelompok penting tersebut.

Konsep *stakeholder* pertama kali juga di kenalkan oleh Stanford Reasearch Intitute pada tahun 1963 yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok-kelompok yang tidak akan ada dengan adanya dukungan organisasi. (Friedman and Miles, 1996) awalnya munculnya konsep ini ialah untuk mengklasifikasikan dan mengevaluasi konsep kinerja perusahaan, (Caroll 1991).³¹

Lebih lanjutnya Friedman berpendapat bahwasanya pemahaman hubungan antar kelompok dan individu yang mempengaruhi organisasi dalam sarana analisis efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Konsep ini telah di perdebatkan dalam literatur fungsi-fungsi manajemen strategis, seperti perencanaan perusahaan kinerja, teori sistem dan tanggung jawab sosial perusahaan.

³¹ Dimas Luqit Chusama Arrozaaq/Kolaborasi tentang stakeholder dalam pengembangan kawasan minopolitan di kabupaten Sidoarjo.

Stakeholder sendiri juga merupakan sebuah kelompok organisasi laki-laki maupun perempuan yang memiliki kepentingan khusus, mempengaruhi atau dipengaruhi. Kunci dari *stakeholder* harus memiliki hubungan dengan instansi baik yang berhubungan dengan bidang ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya. Posisinya sangat mempengaruhi hasil dari sebuah usaha baik secara keseluruhan atau beberapa bagian saja.³²

Menurut Crosby (1992) (dalam Iqbal, 2007), *stakeholder* dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. *Stakeholder* Utama (Primer) adalah yang menerima dampak positif atau negatif secara langsung (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan. *Stakeholder* primer harus dilibatkan dalam tahapan-tahapan kegiatan.
2. *Stakeholder* Pendukung (Sekunder) adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, organisasi pemerintah, LSM, dan pihak swasta. *Stakeholder* sebuah penunjang, atau berupa perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal.
3. *Stakeholder* kunci adalah yang berpengaruh kuat atau memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Analisis *stakeholder* diperlukan untuk mengetahui peran masing-masing *stakeholder* yang merupakan aktor atau kelompok yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan

³² <http://pengertianparaahli.com/pengertian-stakeholder-adalah/>

dari sebuah program (Oktavia dan Saharuddin, 2013). Untuk menganalisis, metode yang digunakan adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh Groenendijk (2003) untuk mengetahui peranan dan fungsinya. Metode ini diawali dengan mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dan mengklasifikasikan berdasarkan kepentingannya secara langsung maupun tidak langsung dengan proyek yang ada. Menurut Reed et al. (dalam Oktavia dan Saharuddin, 2013) analisis *stakeholders* dilakukan dengan cara:

1. Melakukan identifikasi *stakeholder*,
2. Mengelompokkan dan membedakan antar *stakeholder*,
3. Menyelidiki hubungan antar *stakeholder*.

Dari analisis *stakeholder* tersebut, tentu memiliki atribut yang berbeda untuk dikaji sesuai dengan situasi dan tujuan. Atribut yang dimasukkan dalam analisis adalah pengaruh (*power*) dan kepentingan (*importance*). Reed et al. (2009) merujuk kepentingan (*importance*) pada kebutuhan *stakeholder* dalam pencapaian output dan tujuan. Sedangkan kekuatan (*power*) merujuk pada pengaruh yang dimiliki *stakeholder* untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan.

Menurut Nugroho (dalam Handayani dan Warsono, 2017) *stakeholder* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

1. *Policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.



3. Fasilitator yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementer yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan *stakeholders* dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terdiri dari individu maupun kelompok yang memiliki kekuasaan maupun kepentingan dan terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa *stakeholder* adalah sebuah kelompok yang sama-sama mempunyai kepentingan, dengan adanya *stakeholder* banyak pencapaian yang sudah diperoleh. Maka dari itu dengan ini pemerintah kota Malang dapat meningkatkan kerjasama antar *stakeholder* dalam mengetaskan kawasan kumuh yang ada di kota Malang.

Menurut Hill (1996, hal 129), *stakeholders* dalam pelayanan sosial meliputi negara, sektor privat, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), sedangkan Chariri dan Ghazali (2007.h.32,) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (*Stakeholders*, kreditor, konsumen, supplier, Pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain).³³

³³ Chariri,A,& Ghazali,I.(2007).Teori Akuntansi, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.hal.32

Mengacu pada pengertian di atas *stakeholder* merupakan aktor atau atribut yang mempunyai kekuasaan serta peran penting dalam sebuah program untuk kerjasama antar pihak, maka dari itu dapat di tarik pada suatu penjelasan bahwa dalam suatu aktivitas perusahaan di pengaruhi oleh beberapa aktor-aktor dari luar maupun dari dalam untuk mencapai target mereka, tujuan serta kepentingan yang sama, hal ini dapat kita ketahui lebih jelasnya bahwa *stakeholder* adalah suatu kelompok, kumunitas sebagai pendukung atau investor yang memiliki hubungan dan kepentingan yang sama maupun berbeda.

B. Collaborative Governance

Berbagai kerjasama antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan Pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat hal ini merupakan suatu upaya akan keterbatasan akan sumberdaya dalam menanganinya. Kerjasama antar *stakeholder* dalam penanganan lingkungan kumuh yang dilakukan oleh *stakeholder* di kampung Jodipan yang sebelumnya tidak melibatkan Pemerintah kota Malang namun waktu ke waktu mau tidak mau Pemerintah ikut terlibat dan akhirnya masuk dalam kegiatan di kampung Jodipan yang akhirnya di artikan sebagai *collaborative governance*.

Pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk dikembangkan sebab pendekatan kolaboratif menjelaskan bahwa sistem kolaborasi akan mengenalkan mengenai berbagi jenis konsep yang mewadahi suatu proses terutama antar Pemerintah dengan swasta dan masyarakat,



dimana adanya kepentingan dan kebutuhan yang beragam untuk dipecahkan melalui sebuah dialog dan kolaborasi.³⁴

Menurut Ansell dan Gash, “*collaborative governance is a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*” (*collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama yang sifatnya musyawarah. Kolaborasi pemerintah ini juga bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik serta mengelola sebuah program pemerintah).³⁵

Collaborative governance yang ditekankan oleh Ansell dan Gash merujuk pada upaya Pemerintah dan *Stakeholder* yang terlibat untuk menangani sebuah permasalahan di masyarakat. Dan terdapat beberapa serangkaian faktor yang sangat penting dalam proses kolaboratif, faktor-faktor tersebut adalah musyawarah, membangun kepercayaan, mengembangkan komitmen serta pemahaman bersama.³⁶

Seperti yang sudah dipaparkan bahwa kolaborasi juga menggambarkan sebuah komunikasi antara lembaga yang memangku kepentingan yang harus bertemu bersama dalam proses musyawarah dan kerjasama, dengan proses

³⁴ Deniok Kurnasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron, *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 Nomor 1, Maret 2017, hal 2

³⁵ Chriss Ansell & Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, University of California, Berkeley, hal 544.

³⁶ Ibid

yang harus bersifat kolektif. Komunikasi menjadi hal penting dalam sebuah kolaborasi dikarenakan banyaknya kegagalan dalam sebuah kolaborasi karena kurangnya komunikasi yang baik diantara instansi maupun *stakeholder*.

Ansell dan Gash membedakan kolaborasi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut, kolaborasi yang diartikan secara normatif dan kolaborasi yang diartikan dalam proses. Kolaborasi yang diartikan secara normatif adalah aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi dengan para partner atau mitranya, sedangkan kolaborasi yang diartikan dalam proses adalah serangkaian proses dalam mengatur semua pihak yang terlibat dalam halnya pemerintah dan *stakeholder*, maksud dari kolaborasi dalam arti proses merujuk pada sejumlah institusi pemerintah maupun non-pemerintah yang ikut di libatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya.³⁷

Seperti yang sudah di jelaskan di atasnya, kolaborasi di gunakan untuk menyatukan perbedaan sudut pandang serta menyatukan antar pihak atau aktor dengan tujuan yang berbeda maupun sama untuk lebih mengedapankan nilai-nilai bersama dan untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi semua pihak. Dalam hal ini kolaborasi adalah sebuah konsep untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu, dan pihak-pihak tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan. Dari dua definisi ini dapat dilihat bahwa kolaborasi merupakan solusi atas keterbatasan yang di alami oleh individu atau organisasi.

³⁷ Sudarmo, *Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapai Efektivitas Collaborative Governance*, Jurnal Spirit Publik, Volume 5 Nomor 2, 2009, hal 123.

Menurut Fendt (2010:22) ada tiga alasan mengapa organisasi ataupun instansi harus melakukan kolaborasi yaitu:

1. Organisasi perlu berkolaborasi, karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain.
2. Dengan berkolaborasi, keuntungan yang akan didapat dan organisasi akan lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri.
3. Dengan berkolaborasi, organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar.

Berdasarkan beberapa pendekatan ahli diatas, dijelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan Pemerintah yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dengan sendirinya. Perlu adanya kerjasama anatar pihak, dengan ini Pemerintah dapat di mudahkan dalam menangani permasalahan di lapangan, lebih tepatnya dalam menangani lingkungan kumuh yang berada di titik kota Malang. Menurut Kepala Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang (Barenlitbang)

Erik Setyo Santoso mengatakan pengetasan kawasan kumuh itu tidak bisa dilakukan oleh Pemko kota Malang sendiri namun harus dilakukan keroyokan oleh pusat, provinsi dan kota ujar kepala Barenlitbang bapak Erik Setyo Santoso Juma't (29/9/2017).

Seperti yang sudah di ungkapkan diatas pengetasan kawasan kumuh tak dapat dilakukan sendiri perlu adanya kerjasama antar seksama atau gotong-royong.

1. Tahap Proses Collaborative Governance

Menurut Ratner, terdapat tiga fokus fase didalam *collaborative governance* yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan, yaitu sebagai berikut:³⁸

a. *Identifying Ostacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Pada fase ini, pemerintah dan *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi yakni swasta dan masyarakat akan melakukan identifikasi mengenai hambatan-hambatan yang akan mereka hadapi selama proses kolaborasi dilakukan. Setiap *stakeholder* yang terlibat akan saling menjelaskan permasalahan dan *stakeholder* yang lain akan mendengarkan setiap permasalahan yang dijelaskan.

Setelah menjelaskan permasalahan masing-masing, kemudian mereka akan mempertimbangkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti solusi apa yang akan dilakukan jika permasalahan tersebut betul terjadi. Dan setiap *stakeholder* memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dan kemudian mempertimbangkan peluang berupa pencapaian yang dapat di hasilkan dari masing-masing pihak yang terlibat.

³⁸ Denny Irawan, *Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 5 Nomor 3, September-Desember 2017, hal 6.

b. *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Pada fase dialog ini, *stakeholder* yang terlibat didalam kolaborasi akan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah dijelaskan didalam fase pertama. Dialog yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* meliputi dialog mengenai langkah yang akan di pilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Setelah itu, mereka akan berbicara mengenai pihak-pihak yang nantinya mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi.

c. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Pada tahap terakhir ini, *stakeholder* yang terlibat akan melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah di bicarakan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam berkolaborasi. Setelah itu, mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk memastikan bahwa kolaborasi tersebut akan berjalan baik dalam jangka panjang.

Menurut DeSeve, dalam melakukan kolaborasi terdapat hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan dari kolaborasi tersebut, tolak ukur keberhasilan kolaborasi dilihat dari poin-poin dibawah ini: ³⁹

³⁹ Ratna Trisuma Dewi, *Tesis: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo)*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal 78-85.

a. *Type network structure* (jenis struktur jaringan)

Poin ini kemudian mengkategorikan tipe *network structure* kedalam bentuk yaitu, *self governance*, *lead organization*. Didalam model *self governance* semua yang terlibat dalam *network* dapat berpartisipasi aktif dan mereka juga memiliki komitmen serta terdapat kemudahan dalam membentuk *network* tersebut. Namun, model ini dianggap tidak efisien karena seringnya pertemuan yang dilakukan sedangkan pembuatan keputusan sangatlah terdesentralisir, dan dalam model *lead organization*, model ini dianggap efisien dan terarah.

b. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Poin kedua ini mengacu pada alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada, alasannya karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-tujuan ini biasanya terartikulasikan di dalam misionarium suatu organisasi pemerintah.

c. *Trust among the participants* (adanya kepercayaan diantara para aktor yang terlibat dalam program)

Kepercayaan diantara para aktor yang terlibat didasarkan pada hubungan profesional atau sosial dimana adanya keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan informasi atau usaha-usaha dari *stakeholder* lainnya, dalam suatu program untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah unsur ini sangat mendasar karena adanya keyakinan bahwa mereka harus memenuhi mandat bahwa mereka bisa percaya terhadap partner-partner lainnya yang juga berada di dalam



lingkup pemerintahan serta untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.

d. Kejelasan dalam tata kelola program

Adanya kejelasan dalam tata kelola program terdiri dari *boundary* dan *exclusivity* yang menegaskan bahwa siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota, berarti jika sebuah kolaborasi di lakukan harus ada kejelasan siapa saja yang termasuk kedalam program dan siapa yang diluar program. *Rules* atau aturan yang menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku kepada pihak yang terlibat dengan sanksi bahwa mereka akan di dikeluarkan jika perilaku mereka tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui.

e. *Distributive accountability or responsibility* (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas)

Pembagian akuntabilitas atau responsibilitas yakni berbagi pengelolaan atau manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya, pembuatan keputusan juga dilakukan oleh seluruh partisipan yang terlibat, dengan demikian tanggung jawab yang ada pun juga dilakukan bersama-sama.

f. *Information sharing* (berbagi informasi)

Information sharing yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang) dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima



oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

g. *Access to resources* (akses terhadap sumberdaya)

Poin terakhir ini mengacu pada ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya konsep *collaborative governance* dapat menjadi program kerjasama antar *stakeholder* dalam penanganan lingkungan kumuh yang saling terkait antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. *Collaborative* diartikan sebagai sebuah kerjasama yang melibatkan beberapa aktor yang saling interaksi dan saling menguntungkan antar satu sama lain. Dalam hal lain Pemerintah juga sadar akan keterbatasan mereka dalam menangani masalah permukiman kumuh, hal inilah yang menuntut agar pemerintah melakukan sebuah kolaborasi dengan berbagai pihak seperti lembaga swasta, Perguruan Tinggi, perusahaan atau masyarakat.

2. Proses Colaborative Governanace

Proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), karena melihat komponen yang komprehensif dan tepat di gunkan dalam menjawab permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Teori proses kolaborasi ini disebut *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan begitu dapat menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara sebelum masuk ke dampak utama serta adaptasi.

Proses ini melakukan berbagai komponen dalam CGR untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi di antaranya adalah:

1. Dinamika kolaborasi
2. Tindakan-tindakan kolaborasi
3. Dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.
4. Dinamika Kolaborasi

Dalam kolaborasi yang sedang berlangsung lebih banyak determinasi substantif yang dibuat secara terus-menerus, karena sifatnya lebih dibutuhkan. Sedangkan melihat praktisnya, determinasi dapat diwujudkan melalui pembentukan konsensus sebagai metode fundamental dalam pembentukan determinasi bersama. Kesimpulannya, pergerakan prinsip bersama dibentuk dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan kolaborasi dan determinasi. Sedangkan efektivitas pergerakan prinsip bersama ditentukan oleh kualitas masing-masing dan ada beberapa yang dapat menjadi pegangan dalam melakukan kolaborasi yaitu:



1. Motivasi bersama (*Shared motivation*)

Motivasi bersama hampir sama dengan dimensi proses kolaborasi yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash kecuali legitimasi. Motivasi bersama menekankan pada elemen interpersonal dan realisional dari dinamika kolaborasi yang kadang disebut dengan modal sosial. Komponen ini diinisiasi oleh pergerakan prinsip bersama yang merupakan hasil jangka menengah, namun menurut Huxham dan Vagen

dalam Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) motivasi bersama juga memperkuat dan meningkatkan proses penggerakan prinsip bersama. Emerson, Nabatchi & Balogh (2012:3)

2. Kepercayaan bersama (*Mutual trust*)

Unsur pertama dari motivasi bersama adalah pengembangan kepercayaan bersama. Menurut Fisher dan Brown dalam Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012). Kepercayaan bersama akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada saat akan melakukan kolaborasi, mengenal satu sama lain dan saling membuktikan bahwa diri mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat di andalkan.

3. Pemahaman bersama (*Mutual understanding*)

Pemahaman bersama melahirkan kepercayaan kepada *stakeholder* lain. “*Mutual understanding*” tidak sama dengan kata “*Shared understanding*” yang dikenalkan oleh Ansell dan Gash. *Shared understanding* adalah kondisi dimana semua *stakeholder* menyetujui tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Sedangkan, *mutual understanding* lebih ke arah pemahaman bersama yang dimaksud untuk membuat sesama *stakeholder* saling mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan *stakeholder* lain bahkan jika *stakeholder* tersebut tidak sependapat, atau sepemahaman, pembentukan sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.



4. Legitimasi internal (*Internal legitimitation*)

Legitimasi internal merupakan pengakuan yang berasal dari internal kolaborasi. Dalam hal ini aktor-aktor dalam berkolaborasi diuntut untuk dapat dipercaya, dan kredibel terhadap kepentingan bersama., aktor-aktor kolaborasi harus menyadari bahwa ada rasa ketergantungan antar aktor yang menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan. Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama, sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen ini.

5. Komitmen (*Commitment*).

Adanya komitmen pada proses kolaborasi mampu menghilangkan penghambat yang seringkali muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen membuat para aktor berinteraksi lintas organisasi sehingga terbentuk komitmen bersama. Analisis kualitas pembentukan komitmen pada setiap aktor kolaborasi dapat dilihat dari tujuan masing-masing bergabung di dalam kolaborasi, selain itu ada sikap optimis yang harus dimiliki oleh semua aktor.

Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa kepercayaan merupakan bagian penting dan mutlak dalam kemajuan kolaborasi, kepercayaan juga di konseptualisasikan sebagai mekanisme yang akan menghasilkan rasa saling mengerti antar *stakeholder* yang pada akhirnya akan menghasilkan legitimasi



bersama dan bermuara pada adanya komitmen bersama, dan interaksi yang berkualitas membentuk kepercayaan bersama antar pihak satu dengan pihak lainnya agar menciptakan sebuah kerjasama dan komitmen yang baik.

Selain itu tujuan berkolaborasi untuk menghasilkan hasil yang memuaskan yang di harapkan bersama yang tidak dapat di lakukan secara individu maupun oleh satu aktor saja, hal ini dikarenakan kolaborasi melibatkan aktifitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian CGR harus menghasilkan kapasitas baru bagi masing-masing aktor untuk bertindak bersama yang di lakukan dalam kurun waktu tertentu.

Adapun konsep dan strategi lain yang dapat di gunakan oleh Pemerintah Kota Malang dalam berkolaborasi untuk menangani lingkungan kumuh yaitu, strategi *Pentha helix* yang saat ini menjadi trobosan baru untuk Pemerintah atau untuk semua kalangan dengan memberikan konsep yang lebih menarik.



C. **Pentha Helix**

Pentha helix saat ini menjadi trobosan dan strategi baru di jaman milenial ini bahkan beberapa kepala daerah sudah menjadikan konsep *pentha helix* sebagai strategi baru untuk menangani beberapa masalah yang terjadi di daerahnya, *Penhta Helix* sendiripun cukup menjadi kunci dalam permasalahan kolaborasi pemerintah dalam menangani lingkungan kumuh yang masih ada di kota Malang. *Pentha Helix* sendiri sudah di adakan di forum *Pentha helix* dalam Sinergi Industri Bersih Kota Cimahi” pada hari

Rabu (20/02/2019) di ruang Rektorat IKIP Siliwangi Jalan Terusan Jenderal Sudirman Cimahi.⁴⁰

Dalam acara yang digagas oleh Citarum Institut ini, selain Kolonel Inf. Yusep Sudrajat selaku Dansektor 21 satgas Citarum Harum, dan hadir undangan lain yaitu Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd selaku Rektor IKIP Siliwangi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, APINDO Cimahi, Radio Elshinta Bandung, Wahyu Darmawan selaku penggiat lingkungan.⁴¹ Forum Sinergi *Pentha helix* Sinergi Industri bersih Kota Cimahi ini merupakan acara awal untuk persiapan MoU dan program kerja konsep *Pentha helix* yang akan dilakukan oleh beberapa pihak nantinya. Secara umum, konsep *pentha helix* merupakan suatu kolaborasi antara 5 komponen strategis yang terdiri dari institusi, akademik, komunitas, pemerintah, bisnis, dan media.

Penjelasan di atas cukup di pahami bahwa *Pentha helix* saat ini menjadi strategi baru untuk Pemerintah, oleh karena itu dalam penanganan lingkungan kumuh yang masih ada di Kota Malang dapat menjadikan *Pentha helix* sebagai strategi baru untuk melakukan kerjasama antar pihak dalam penanganan lingkungan kumuh Kota Malang, saat ini konsep *Pentha helix* terima baik oleh semua kalangan Pemerintah maupun masyarakat untuk di jadikan konsep dan strategi baru.

Pentha helix juga menjadi salah satu tema dalam forum diskusi dan seminar dengan mendatangkan berbagai praktisi dan pembicara dalam forum seminar itu, fokus pada bagaimana pengembangan entrepreneurship oleh *akademisi, Bisnis, Community, Government, Media* atau seringkali disingkat

⁴⁰ <http://www.edupublikjabar.com/2019/02/21/persiapan-mou-dan-program-kerja-dalam-konsep-pentahelix>

⁴¹ Ibid

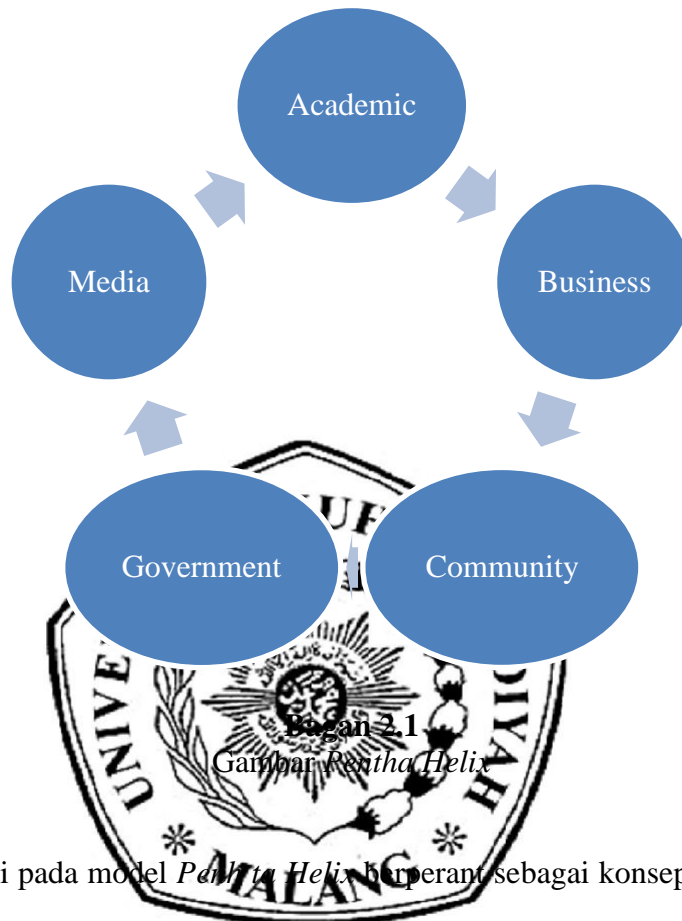
menjadi ABCGM dan hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap *stakeholders* dalam membangun *entrepreneurship* yang seringkali dianggap kurang optimal. Mendiskusikan konsep *penta Helix* ini karena bisnis yang saat ini di kembangkan oleh para entrepreneur, mulai dilirik oleh para akademisi untuk di kembangkan, dan termasuk menjadi salah satu konsep yang di kembangkan oleh para akademisi. Lihat saja bagaimana kampus-kampus mempertajam konsep ini agar dapat diimplementasikan dengan optimal oleh para *stakeholders* yang relevan dengan pengembangan *entrepreneurship* untuk negara ini.⁴²

Kolaborasi dalam konsep *Penta Helix* merupakan kegiatan kerjasama antar bidang *Academic, Business, Community, Government*, dan *Media*, atau dikenal sebagai ABCGM, hal ini untuk mempercepat pengembangan sebuah negara. Adapun komunitas atau *Community* yang merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama akan saling mencari dan berkolaborasi. *Penta Helix* akan menjadi konsep dan sumber pengetahuan bagi pemerintah dengan teori-teori terbaru yang relevan. Dengan hal ini Pemerintah kota Malang dapat mengembangkan kota Malang dan mencapai *sustainable development, competitive dan advantage*.

Pemerintah juga harus di optimasi oleh setiap entrepreneur dalam mengembangkan tujuan karena berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak kalah penting adalah media yang harus di optimasi untuk kepentingan bersama dan membrandingkan diri untuk kepentingan bersama, dengan saling mengoptimasi satu sama lain, sehingga

⁴² www.strategidanbisnis.com

sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Inilah yang harus di manfaatkan oleh Pemerintah dalam konsep *pentha helix*, dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peran *stakeholders*, berikut merupakan paparan analisis peran *stakeholders* pada model *Pentha Helix* di antara lain:



1. *Academic*

Akademisi pada model *Pentha Helix* berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan ketrampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan.

2. *Business*

Bisnis pada model *Pentha Helix* berperan sebagai enabler. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bisnis berperan sebagai enabler yang menghadirkan infrastruktur.

3. *Community*

Komunitas pada model *Pentha Helix* berperan sebagai akselerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu memudahkan tujuan dan rencana bersama.

4. *Government*

Pemerintah pada model *Pentha Helix* berperan sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab.

5. *Media*

Media pada model *Pentha Helix* berperan sebagai expender. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat brand image dalam sebuah program dan melalui wensite atau media lainnya sebagai media untuk promosi dan informasi.⁴³

Kesimpulan penjelasan di atas adalah dengan adanya konsep baru dari *Pentha Helix* menjadi strategi baru untuk mengembangkan daerah yang masih meninggalkan beberapa kawasan kumuh. Kolaborasi dalam konsep *Pentha Helix* sendiri juga merupakan salah satu kunci untuk membangun sinergi guna meningkatkan kawasan yang jauh dari kekumuhan dan untuk mengembangkan daerah itu sendiri. Hal ini dapat menjadi senjata baru bagi pemerintah Kota Malang untuk melibatkan seluruh pemangku kepetingan dalam mengetaskan kawasan kumuh di Kota Malang.

⁴³ Stakeholders pada Model Penta Helix dalam UMKM Bordir dan Konfeksi Desa Padurenan

“Seperti yang dicanangkan pertama kali oleh menteri pariwisata Arief Yahya serta dituangkan ke dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan, manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *academic, bussiness, community, and media* (ABCGM).”⁴⁴

Penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep *Pentha Helix* dapat memudahkan pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada, dan menjadi trobosan baru bagi semua kalangan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Arief Yahya bahwa hal ini diperlukan sistem pendorong melalui optimasi peran *academic, bussiness, community, and media* (ABCGM).

D. Dasar Hukum Penanganan Lingkungan Kumuh

Rumah serta lingkungan bersih merupakan salah satu kebutuhan yang ingin dimiliki oleh setiap masyarakat namun hal tersebut masih sulit terpenuhi oleh masyarakat Jodipan karena beberapa faktor. Sedang menurut Nawagamuwa dan Nils Viking keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial dan budaya dari para penghuni kawasan permukiman tersebut. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Nawagamuwa dan Viking dalam menjelaskan kawasan permukiman kumuh adalah:⁴⁵

1. Penampilan fisik bangunan dengan banyaknya bangunan-bangunan sementara yang berdiri serta terlihat tidak terurus maupun tanpa perawatan.

⁴⁴ Handy Aribowo, Alexander Wirapraja, Yudithia Dian Putra. Implementasi Kolaborasi model Pehta Helix dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Timur serta meningkatkan perekonomian domestik. Hal, 30

⁴⁵ Augi Sekatia, Kajian Permukiman Kumuh dan Nelayan Tambak Lorok Semarang (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat), Modul Volume 15 Nomor 1, Januari-Juni 2015, hal 59.

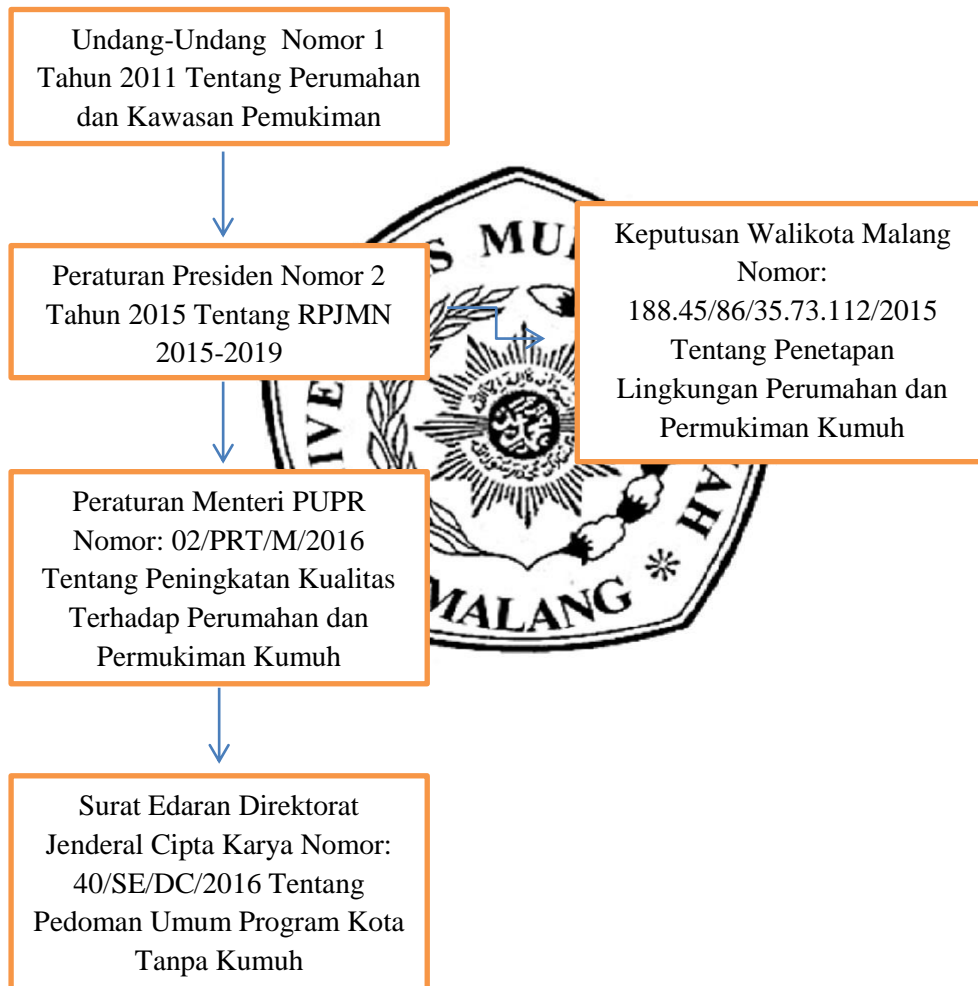
2. Pendapatan yang rendah juga salah satunya karena mencerminkan status ekonomi mereka, biasanya masyarakat kawasan yang memiliki penghasilan rendah akan cukup sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan dasar akan tempat tinggal.
3. Kepadatan bangunan yang tinggi, dan tidak adanya jarak antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya juga *siteplan* yang tidak terencana.
4. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen.
5. Sistem sanitasi tidak dalam kondisi yang baik.
6. Kondisi sosial yang tidak dapat dihindari karena banyaknya tindak kejahatan maupun tindak kriminal.

Adapun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh yang menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria permukiman kumuh ditinjau dari beberapa hal yaitu:

1. Bangunan gedung
2. Jalan lingkungan
3. Penyediaan air minum
4. Drainase lingkungan
5. Pengelolaan air limbah
6. Pengelolaan persampahan dan

7. Proteksi kebakaran.

Dalam Hal ini negara sebagai penanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menyediakan kemudahan perolehan lingkungan yang bersih serta rumah yang layak huni bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang jauh dari kekumuhan. Maka dari itu disusunlah produk-produk normatif yang mendukung bahwa pemerintah bertanggung jawab menjadi fasilitator dan regulator dalam menangani permasalahan perumahan dan permukiman yang masuk dalam kawasan kumuh.



Mengacu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa negara

bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman serta memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Melihat permasalahan permukiman kumuh yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu pemerintah tidak tinggal diam dan kemudian mengambil sebuah langkah untuk mengentaskan permasalahan permukiman kumuh. Pada tahun 2015, digulirkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang didalamnya mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yakni dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan permukiman kumuh. Dimana di dalamnya juga dijelaskan mengenai kriteria serta tipologi perumahan dan permukiman kumuh, penetapan lokasi dan perencanaan penanganan, pola-

pola penanganan, pengelolaan, pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal.

Selanjutnya berdasarkan RPJMN 2015-2019 yang telah dijelaskan diatas, maka perlu ditetapkannya kawasan kumuh sebagai target sasaran penanganan. Pemerintah Kota Malang kemudian menetapkan beberapa kelurahan yang telah tercantum di dalam Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/86/35.73.112/2015 Tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

E. Konsep Permukiman Kumuh

Terdapat sebuah konsep kebijakan publik yang di kemukakan oleh Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis yang menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup beberapa hal yaitu, bidang kegiatan dari tujuan atau pernyataan yang ingin dicapai, rancangan tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah, ketentuan normatif seperti undang-undang ataupun peraturan pemerintah, program dan output.⁴⁶

Implementasi Kebijakan publik sering dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam suatu Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam organisasi (publik atau privat), *stakeholder* dan aktor yang dimana prosedur dan teknisnya digerakkan untuk bekerjasama dalam menerapkan kebijakan yang dikehendaki. Alasan ini dimaksudkan agar sikap, pikiran dan perilaku dari

⁴⁶ A.Syamsu Alam, Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 3, Juni 2012, hal 81.

semua pihak yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga kerjasamanya.⁴⁷

Begitu pula dengan Kerjasama antar *Stakeholder* dalam Penanganan lingkungan kumuh yang merupakan bentuk riil dari kegiatan kerjasama untuk mengentaskan permasalahan permukiman kumuh yang dimana dalam implementasinya telah ditetapkan didalam beberapa produk normatif. Seperti yang dijelaskan, produk normatif ditetapkan agar setiap aktor yang terlibat bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Beberapa poin di atas ditegaskan oleh teori pertumbuhan penduduk dari Robert Malthus yang beranggapan bahwa penduduk cenderung meningkat lebih cepat daripada persediaan bahan makanan, dimana penduduk tumbuh bagaikan deret ukur dan persediaan hitung yang maksudnya adalah jumlah penduduk terus meningkat sehingga menyeret masyarakat kedalam kemiskinan karena sumberdaya bumi tidak mampu mengimbangi kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan cepat.

Hal itulah yang menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat salah satunya permukiman kumuh, karena pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat dan lahan perkotaan semakin terbatas serta RTH yang semakin sempit ditambah lagi dengan tingkat pendapatan perekonomian yang minim sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar.⁴⁸

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kumuh ini bertumpu pada masyarakat.

⁴⁷ Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, MA. Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal 133.

⁴⁸ Candra Mustika, Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Indonesia Periode 1990-2008, Jurnal Paradigma Ekonomika, Volume 1 Nomor 4, Oktober 2011, hal 13-14

Masyarakat sendiri harus ikut berperan aktif didalamnya, karena sebetulnya masyarakat adalah aktor utama didalam permasalahan lingkungan kumuh. Masyarakat di tuntut untuk mengelola lingkungan dengan merubah sikap dan sifat mereka yang cenderung kurang acuh terhadap lingkungan.⁴⁹ Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi fasilitator dan regulator yang memberikan pemahaman, bantuan serta kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi standar kehidupan yang layak.

Pengertian permukiman sendiri berbeda dengan istilah perumahan, permukiman mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan perumahan yang diartikan semata-mata pada pengertian fisiknya saja. Namun pada dasarnya perumahan dan permukiman saling berkaitan erat dimana keduanya memiliki kesatuan pengertian fungsional, perumahan merupakan sebuah subsistem dari permukiman.⁵⁰

Kawasan permukiman di dominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, tempat bekerja yang memberi pelayanan dan kesempatan kerja terbatas yang mendukung penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, sarana dan prasaranan lingkungan terstruktur yang memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal.⁵¹

⁴⁹ Nia Kurniati, Pemenuhan Hak Atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1 Nomor 1, 2014, hal 82

⁵⁰ Augi Sekatia, Kajian Permukiman Kumuh dan Nelayan Tambak Lorok Semarang (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat), Modul Volume 15 Nomor 1, Januari-Juni 2015, hal 58.

⁵¹ Soedjajadi Keman, Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, hal 31-32

Perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan terencana serta kurang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah dan saluran air hujan juga pembuangan air hujan akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai kawasan kumuh.⁵²

Herbert J. Gans mengungkapkan bahwa “*obsolescences per se is not harmful and designation of an area as a slum for the reason alone is merely a reflection of middle class standards and middle class incomes*”(Herbert mendefinisikan kumuh sebagai kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah, dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan).⁵³ Hal ini dikarenakan pendapatan mereka yang rendah dan minim sehingga kebutuhan dasar seperti memiliki rumah yang layak huni sulit terwujud.

Taylor berpendapat bahwa terdapat empat tipe permukiman kumuh.⁵⁴

1. Permukiman kumuh yang berdiri diatas sungai atau tepian pantai dan laut yang disebut sebagai rumah terapung atau penghuni liar yang tinggal diatas perahu.
2. Permukiman kumuh yang digolongkan sebagai kampung disebelah dalam kota.

⁵² Afif Bizrie Mardhanie, Penelitian Pemetaan Kawasan Kumuh Permukiman Kecamatan Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan, Jurnal Inersia, Volume 5 Nomor 1, Maret 2013, hal 2.

⁵³ Eka Dahlan Uar, Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon, Jurnal Fikratuna, Volume 8 Nomor 2, 2016, hal 130.

⁵⁴ Evans Oktaviansyah, Penataan Lingkungan Kumuh Rawan Bencana Kebakaran Di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan, Jurnal Tata Kota dan Daerah, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hal 160.

3. Permukiman kumuh yang digolongkan sebagai kelompok hunian liar yang relatif terpusat ditengah kota termasuk didalamnya permukiman kumuh di sempadan sungai dan sempadan rel kereta api.
4. Permukiman kumuh yang digolongkan sebagai gubuk liar di daerah pinggiran kota.

Jika mengacu dari empat tipe yang ada diatas, maka tipe yang ketiga merupakan salah satu tipe permukiman kumuh yang terjadi di Kota Malang, terlihat masih banyaknya masyarakat yang bermukim di sempadan sungai salah satunya seperti yang sudah saya jelaskan di bab 1, yaitu Kelurahan Jodipan Kota Malang dimana wilayah permukiman mereka berada di pinggiran sungai Brantas dan di bawah rel kereta dan terdapat berbagai kegiatan masyarakat yang tidak sebaiknya dilakukan hal itulah yang menjadi pemicu munculnya permukiman kumuh.

Masalah perumahan dan permukiman sendiri merupakan permasalahan tanpa akhir dimana permasalahan perumahan dan permukiman berkaitan dengan proses pembangunan serta menjadi terminan dari dampak keterbelakangan pembangunan pada umumnya. Muncul beberapa masalah perumahan dan permukiman disebabkan karena hal-hal berikut ini: ⁵⁵

1. Kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga menimbulkan kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.

⁵⁵ Asep Hariyanto, Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus: Kota Pangkal Pinang), Jurnal PWK Unisba, hal 13.

2. Keterbatasan kemampuan serta kapasitas dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
3. Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan yang masih belum optimal khususnya menyangkut kesadaran akan penting hidup sehat.
4. Kurang pahamnya beberapa kriteria teknis dari pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman khususnya lahan yang berbasis pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang.

Dalam hal ini dapat kita ketahui bersama bahwa Penanganan lingkungan kumuh harus dilandasi oleh karakteristik lahan dan sekitarnya. Ada beberapa pertimbangan utama dalam menentukan sebuah konsep, strategi dan bentuk penanganannya, salah satunya peran serta dari *stakeholder*. Peran serta *stakeholder* dalam menangani kawasan permukiman kumuh merupakan satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Pentingnya sebuah konsolidasi para *stakeholder* untuk mengaktifkan pelaksanaan kegiatan.

Konsolidasi dilakukan dengan membentuk forum komunikasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Forum komunikasi ini menjadi wadah kerjasama untuk menemukan berbagai macam kepentingan seperti menjembatani kepentingan masyarakat dengan pihak yang terlibat, merumuskan kesepakatan mengenai wewenang dan tanggung jawab serta mempromosikan pentingnya kesadaran serta rasa ikut memiliki dalam mengelola aset yang telah diberikan negara.

Beberapa kriteria yang disebutkan diatas adalah dasar dari perumusan indikator gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi permukiman kumuh

tidak hanya ditinjau dari segi fisik melainkan juga non fisik seperti perilaku masyarakat, kawasan kumuh merupakan kondisi dengan kerawanan lingkungan fisik seperti rawan banjir, kebakaran. Sarana prasarana yang kurang memadai serta sanitasi lingkungan yang buruk dan kurang adanya sumber air bersih dan lingkungan perumahan yang padat membuat kurang layak di huni.



